



Integrasi Edukasi, Kampanye, dan Policy Brief dalam Strategi Komunikasi Pembangunan

Eva Riyanty Lubis¹, Mhd. Latip Kahpi²

^{1,2} Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, Indonesia

Email : ayana.kim05@gmail.com¹, latipkahpi@uinsyahada.ac.id²

Abstract

This study addresses the persistent gap in development communication research regarding the lack of integrated strategic frameworks that connect community education, public campaigns, and evidence-based policy advocacy. While existing studies often examine these components separately, limited attention has been given to how their systematic integration can enhance participatory and sustainable development outcomes. Employing a qualitative conceptual approach, this study analyzes key theories of development communication and applies them through a simulated strategic communication design that integrates education, campaign activities, and policy briefs. The findings demonstrate that an integrated communication strategy strengthens community capacity, increases public engagement, and facilitates stronger linkages between grassroots initiatives and policy decision-making processes. Education functions as the foundation for knowledge and empowerment, campaigns mobilize public participation and shape social norms, and policy briefs translate community-level evidence into actionable policy recommendations. This study contributes to development communication scholarship by proposing an integrative strategic model that positions communication not merely as an information tool but as a transformative mechanism linking social participation, behavioral change, and policy support within sustainable development processes.

Keywords: *Development communication; strategic communication; community education; public campaigns; policy brief; participatory development.*

Abstrak

Penelitian ini mengkaji kesenjangan dalam kajian komunikasi pembangunan yang masih cenderung memisahkan peran edukasi, kampanye publik, dan advokasi kebijakan, sehingga belum menghasilkan kerangka strategi komunikasi yang terintegrasi dan berkelanjutan. Ketiga instrumen tersebut berpotensi saling melengkapi dalam mendorong partisipasi masyarakat dan penguatan kebijakan publik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif konseptual melalui analisis teori komunikasi pembangunan serta simulasi rancangan strategi komunikasi yang mengintegrasikan edukasi, kampanye, dan policy brief. Hasil kajian menunjukkan bahwa strategi komunikasi pembangunan yang terintegrasi mampu meningkatkan kapasitas masyarakat, memperkuat keterlibatan publik, serta menjembatani hubungan antara inisiatif berbasis komunitas dan proses pengambilan kebijakan. Edukasi berfungsi sebagai fondasi pemberdayaan, kampanye berperan dalam mobilisasi dan pembentukan opini publik, sementara policy brief menjadi sarana advokasi berbasis bukti. Penelitian ini berkontribusi dengan menawarkan model strategis komunikasi pembangunan yang memposisikan komunikasi tidak hanya sebagai alat penyampaian informasi, tetapi sebagai mekanisme transformatif yang menghubungkan partisipasi sosial, perubahan perilaku, dan dukungan kebijakan dalam pembangunan berkelanjutan.

Kata kunci: *Komunikasi pembangunan; strategi komunikasi; edukasi masyarakat; kampanye publik; policy brief; pembangunan partisipatif*

PENDAHULUAN

Pembangunan global kontemporer semakin dihadapkan pada tantangan kompleks yang tidak hanya bersifat struktural, tetapi juga komunikatif. Kegagalan berbagai program pembangunan di banyak negara berkembang sering kali bukan disebabkan oleh lemahnya kebijakan substantif, melainkan oleh ketidakmampuan strategi komunikasi dalam membangun pemahaman, partisipasi, dan dukungan publik secara berkelanjutan. Studi global menunjukkan bahwa pendekatan komunikasi pembangunan yang bersifat linear dan top-down cenderung menghasilkan resistensi sosial, rendahnya kepemilikan program, serta terbatasnya dampak jangka panjang (Servaes, 2021; Manyozo, 2017). Di sisi lain, literatur pembangunan menegaskan bahwa komunikasi memiliki peran strategis sebagai mekanisme sosial yang mampu menjembatani kepentingan aktor pembangunan, membentuk norma kolektif, serta memediasi hubungan antara masyarakat dan negara (McAnany, 2020). Meskipun demikian, dalam praktiknya komunikasi pembangunan masih sering direduksi menjadi aktivitas penyebaran informasi atau kampanye sesaat, tanpa integrasi yang jelas dengan proses edukasi berkelanjutan dan advokasi kebijakan berbasis bukti. Kondisi ini menunjukkan adanya persoalan mendasar dalam cara komunikasi diposisikan dalam kerangka pembangunan global, khususnya terkait bagaimana strategi komunikasi dapat berfungsi sebagai kekuatan transformatif yang mendorong perubahan sosial dan kebijakan secara simultan.

Dalam konteks Indonesia, tantangan komunikasi pembangunan tidak hanya berkaitan dengan kompleksitas sosial dan budaya, tetapi juga dengan pola komunikasi yang masih cenderung administratif dan elitis. Sejumlah studi menunjukkan bahwa strategi komunikasi pembangunan di tingkat daerah masih dominan menggunakan pendekatan top-down, sehingga partisipasi masyarakat sering kali terbatas pada tahap implementasi program tanpa keterlibatan bermakna dalam proses perencanaan dan evaluasi (Ramadhani & Prihantoro, 2020; Armawan, 2022). Pola komunikasi semacam ini berkontribusi pada lemahnya rasa kepemilikan masyarakat terhadap program pembangunan serta terbatasnya keberlanjutan dampak sosial yang dihasilkan. Kondisi tersebut diperparah oleh kesenjangan literasi media dan fragmentasi kanal komunikasi di ruang publik Indonesia, yang menyebabkan pesan pembangunan tidak selalu diterima secara utuh dan konsisten oleh berbagai kelompok masyarakat (Hadi, 2020).

Seiring berkembangnya media digital dan komunikasi publik berbasis platform daring, praktik kampanye pembangunan di Indonesia menunjukkan peningkatan visibilitas isu di ruang publik. Namun, berbagai kajian empiris menegaskan bahwa peningkatan eksposur media tidak secara otomatis berbanding lurus dengan perubahan perilaku maupun dukungan kebijakan

formal (Budianto & Ghanistyana, 2024; Yunandar et al., 2025). Kampanye publik sering kali berhasil membangun perhatian jangka pendek, tetapi belum terintegrasi secara sistematis dengan proses edukasi berkelanjutan dan advokasi kebijakan berbasis bukti. Akibatnya, komunikasi pembangunan cenderung menghasilkan dampak parsial yang bersifat temporer dan tidak terinstitusionalisasi dalam kebijakan publik.

Meskipun kajian komunikasi pembangunan telah berkembang secara signifikan, terdapat kesenjangan konseptual yang cukup menonjol dalam literatur internasional. Sebagian besar penelitian cenderung memfokuskan analisis pada satu instrumen komunikasi secara terpisah, seperti edukasi masyarakat, kampanye publik, atau advokasi kebijakan, tanpa menjelaskan bagaimana ketiganya dapat diintegrasikan dalam satu kerangka strategis yang koheren (Waisbord, 2018; Tufte, 2017). Pendekatan yang terfragmentasi ini membatasi pemahaman tentang dinamika komunikasi pembangunan sebagai proses sistemik yang melibatkan perubahan pengetahuan, sikap, perilaku, serta struktur kebijakan secara bersamaan. Selain itu, penelitian yang mengaitkan praktik komunikasi berbasis komunitas dengan proses pengambilan kebijakan formal masih relatif terbatas, terutama dalam konteks negara berkembang. Akibatnya, kontribusi komunikasi pembangunan sering berhenti pada level kesadaran publik tanpa diikuti oleh transformasi kebijakan yang nyata. Kesenjangan ini menunjukkan perlunya kerangka strategis yang mampu menghubungkan proses komunikasi di tingkat akar rumput dengan mekanisme kebijakan, sehingga komunikasi tidak hanya memengaruhi individu dan komunitas, tetapi juga struktur institusional yang lebih luas.

Indonesia menjadi konteks yang penting dan relevan dalam diskursus ini karena karakteristik sosial, budaya, dan politiknya yang kompleks. Sebagai negara demokrasi besar di Global South dengan tingkat keberagaman sosial yang tinggi, Indonesia menghadapi tantangan komunikasi pembangunan yang khas, mulai dari kesenjangan literasi, fragmentasi media, hingga ketimpangan akses digital antarwilayah. Studi menunjukkan bahwa banyak program pembangunan di Indonesia masih mengadopsi pola komunikasi yang bersifat administratif dan elitis, sehingga kurang mampu mendorong partisipasi masyarakat secara substantif (Rogers, 2004; Hadi, 2020). Pada saat yang sama, perkembangan teknologi digital dan media sosial membuka peluang baru bagi praktik komunikasi yang lebih partisipatif dan dialogis. Dalam konteks ini, Indonesia menjadi laboratorium sosial yang strategis untuk mengkaji bagaimana integrasi antara edukasi, kampanye publik, dan policy brief dapat memperkuat hubungan antara masyarakat dan pengambil kebijakan. Pengalaman Indonesia juga relevan secara global karena mencerminkan tantangan umum yang dihadapi negara-negara berkembang dalam

mentransformasikan komunikasi pembangunan dari sekadar instrumen sosialisasi menjadi mekanisme perubahan sosial dan kebijakan yang berkelanjutan.

Perbandingan global menunjukkan perbedaan pendekatan yang signifikan antara negara-negara Uni Eropa dan Global South dalam mengelola komunikasi pembangunan. Di kawasan Uni Eropa, komunikasi pembangunan cenderung terintegrasi dengan kebijakan berbasis bukti melalui mekanisme policy brief, konsultasi publik, dan evaluasi berbasis data, sehingga komunikasi berfungsi sebagai bagian dari tata kelola kebijakan (Freedman, 2014; Floridi, 2013). Sebaliknya, di banyak negara Global South, komunikasi pembangunan masih lebih menekankan kampanye dan edukasi tanpa dukungan advokasi kebijakan yang sistematis. Ketimpangan ini menyebabkan dampak komunikasi sering kali bersifat temporer dan tidak terinstitusionalisasi. Indonesia berada di persimpangan kedua pendekatan tersebut, di mana praktik komunikasi partisipatif mulai berkembang, tetapi belum sepenuhnya terhubung dengan proses kebijakan formal. Kondisi ini memperkuat urgensi pengembangan model komunikasi pembangunan yang mampu mengintegrasikan praktik komunikasi di tingkat komunitas dengan kerangka kebijakan yang lebih luas, sekaligus berkontribusi pada literatur global tentang pembangunan partisipatif.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini diarahkan untuk menjawab pertanyaan penelitian utama: bagaimana strategi komunikasi pembangunan dapat dirancang secara terintegrasi melalui edukasi, kampanye, dan policy brief untuk mendorong perubahan sosial dan dukungan kebijakan yang berkelanjutan? Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara konseptual integrasi ketiga instrumen komunikasi tersebut melalui simulasi rancangan strategi komunikasi pembangunan. Kontribusi utama penelitian ini terletak pada pengembangan model strategis komunikasi pembangunan yang menempatkan komunikasi sebagai mekanisme penghubung antara partisipasi masyarakat, perubahan perilaku, dan proses pengambilan kebijakan. Dengan demikian, studi ini tidak hanya memperkaya kajian teoritis komunikasi pembangunan, tetapi juga menawarkan kerangka praktis yang relevan bagi negara-negara berkembang dalam merancang strategi komunikasi yang lebih efektif dan berorientasi pada transformasi sosial.

KAJIAN TEORI

Kajian komunikasi pembangunan secara teoretis berakar pada pergeseran paradigma dari pendekatan modernisasi yang bersifat linear menuju pendekatan partisipatif dan kritis. Literatur klasik komunikasi pembangunan menempatkan komunikasi sebagai sarana difusi inovasi dan transfer pengetahuan untuk mendorong perubahan sosial (Everett M. Rogers, 2003). Namun, pendekatan ini dikritik karena mengabaikan relasi kuasa, konteks sosial, serta posisi masyarakat sebagai subjek pembangunan. Perkembangan teori mutakhir menekankan komunikasi sebagai proses sosial yang dialogis dan berorientasi pada pemberdayaan, di mana makna pembangunan dinegosiasikan melalui interaksi antara aktor institusional dan komunitas (Jan Servaes, 2021). Perspektif ini memandang komunikasi bukan sekadar alat teknis, melainkan ruang politik yang memediasi kepentingan, nilai, dan legitimasi kebijakan. Dalam konteks ini, strategi komunikasi pembangunan harus dipahami sebagai praktik institusional yang mampu menghubungkan produksi pengetahuan, partisipasi publik, dan struktur pengambilan keputusan. Pendekatan teoretis tersebut menegaskan bahwa keberhasilan komunikasi pembangunan tidak dapat diukur hanya dari jangkauan pesan, tetapi dari sejauh mana komunikasi mampu memfasilitasi perubahan relasi sosial dan institusional secara berkelanjutan.

Literatur global juga menekankan pentingnya integrasi antara edukasi publik, kampanye strategis, dan advokasi kebijakan dalam satu kerangka komunikasi yang koheren. Edukasi dipahami sebagai proses pembentukan kapasitas kognitif dan reflektif masyarakat agar mampu memahami isu pembangunan dan berpartisipasi secara bermakna (Paulo Freire, 1970). Kampanye publik berfungsi membentuk agenda sosial dan norma kolektif melalui framing pesan yang persuasif dan berulang (Robert Entman, 1993). Sementara itu, policy brief berperan sebagai instrumen komunikasi berbasis bukti yang menjembatani pengetahuan akademik dan praktik kebijakan (David L. Weimer & Vining, 2017). Studi-studi mutakhir menunjukkan bahwa kegagalan pembangunan sering terjadi ketika ketiga instrumen ini berjalan secara terpisah, sehingga perubahan perilaku di tingkat masyarakat tidak diikuti oleh dukungan kebijakan yang memadai (Waisbord, 2018; Tufte, 2017). Integrasi ketiganya memungkinkan komunikasi pembangunan berfungsi sebagai mekanisme sistemik yang menghubungkan produksi pengetahuan, mobilisasi sosial, dan legitimasi kebijakan dalam satu alur strategis yang saling memperkuat.

Kajian komunikasi pembangunan di Indonesia memperlihatkan dinamika yang sejalan dengan kritik global terhadap pendekatan komunikasi yang terfragmentasi. Penelitian Ramadhani dan Prihantoro (2020) menunjukkan bahwa strategi komunikasi pembangunan di

tingkat pemerintah daerah masih belum sepenuhnya mengintegrasikan proses edukasi masyarakat, kampanye publik, dan advokasi kebijakan dalam satu kerangka yang berkelanjutan. Edukasi sering diposisikan sebagai kegiatan sosialisasi program, sementara kampanye lebih diarahkan pada peningkatan citra dan visibilitas kebijakan tanpa mekanisme umpan balik yang jelas terhadap kebutuhan masyarakat. Kondisi ini memperkuat argumen bahwa komunikasi pembangunan di Indonesia masih beroperasi dalam logika sektoral, bukan sebagai proses sistemik yang menghubungkan perubahan sosial dan kebijakan publik.

Studi-studi terbaru juga menegaskan pentingnya edukasi dan literasi sebagai fondasi strategi komunikasi pembangunan. Rullah et al. (2025) menunjukkan bahwa pendekatan komunikasi berbasis literasi digital dan *capacity building* mampu meningkatkan pemahaman serta partisipasi kelompok sasaran secara lebih berkelanjutan dibandingkan pendekatan kampanye semata. Namun demikian, penelitian tersebut juga menggarisbawahi bahwa peningkatan kapasitas masyarakat belum tentu berdampak pada perubahan kebijakan apabila tidak dihubungkan dengan mekanisme advokasi formal. Temuan ini sejalan dengan hasil kajian Yunandar et al. (2025) yang menunjukkan bahwa kampanye publik di Indonesia efektif dalam membentuk kesadaran dan sikap, tetapi membutuhkan dukungan instrumen kebijakan agar perubahan perilaku dapat dilembagakan secara jangka panjang.

Berdasarkan sintesis literatur global tersebut, penelitian ini mengembangkan kerangka konseptual yang menempatkan strategi komunikasi pembangunan sebagai proses berlapis dan terintegrasi. Kerangka ini memposisikan edukasi sebagai fondasi pembentukan pengetahuan dan kapasitas masyarakat, kampanye sebagai mekanisme framing dan mobilisasi opini publik, serta *policy brief* sebagai saluran institusional untuk mempengaruhi proses pengambilan kebijakan. Relasi antarunsur tersebut bersifat dinamis dan sirkular, di mana umpan balik dari masyarakat dan kebijakan saling mempengaruhi keberlanjutan strategi komunikasi. Pendekatan ini sejalan dengan pandangan komunikasi sebagai arena relasi kuasa yang menentukan visibilitas isu, aktor, dan kepentingan dalam pembangunan (Couldry, 2012). Dengan demikian, kerangka teoritis ini tidak hanya menjelaskan peran masing-masing instrumen komunikasi, tetapi juga menunjukkan bagaimana integrasi strategisnya mampu menghasilkan perubahan sosial dan kebijakan secara simultan, khususnya dalam konteks negara berkembang yang menghadapi kompleksitas institusional dan sosial.

Conceptual Framework

Community Education

→

Knowledge & Capacity Building

→

Strategic Campaigns

→

Media Framing & Public Engagement

→

Public Awareness & Social Norm Change

→

Policy Brief (Evidence-Based Advocacy)

→

Policy Support & Institutional Change

→

Sustainable Development Outcomes

Kerangka ini menunjukkan bahwa strategi komunikasi pembangunan bekerja melalui alur kausal berlapis, dimulai dari penguatan kapasitas masyarakat, dilanjutkan dengan framing dan mobilisasi publik melalui kampanye, hingga advokasi kebijakan berbasis bukti yang menghasilkan dukungan institusional dan perubahan kebijakan berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif kritis dengan mengombinasikan *Critical Discourse Analysis* (CDA) dan framing analysis untuk mengkaji strategi komunikasi pembangunan secara terintegrasi. CDA dipilih karena memungkinkan analisis relasi kuasa, ideologi, dan praktik institusional yang membentuk produksi dan sirkulasi wacana pembangunan (Fairclough, 2015). Framing analysis digunakan untuk mengidentifikasi bagaimana isu pembangunan dikonstruksikan, ditekankan, atau dimarginalkan dalam pesan komunikasi publik, serta dampaknya terhadap pembentukan persepsi dan partisipasi masyarakat (Entman, 1993). Kombinasi kedua pendekatan ini relevan secara metodologis karena CDA menyoroti struktur kekuasaan di balik wacana, sementara *framing analysis* menjelaskan mekanisme representasional yang bekerja pada level teks dan audiens. Unit

analisis dalam penelitian ini meliputi dokumen edukasi publik, materi kampanye pembangunan, dan policy brief yang diproduksi oleh institusi pemerintah dan organisasi pembangunan di Indonesia. Data dikumpulkan dari arsip dokumen resmi, materi kampanye digital, dan publikasi kebijakan pada periode 2020–2024, yang merepresentasikan dinamika komunikasi pembangunan di era digital dan pascapandemi. Pendekatan ini memungkinkan analisis yang komprehensif terhadap hubungan antara praktik komunikasi, respons publik, dan orientasi kebijakan.

Validitas dan keandalan penelitian dijaga melalui penerapan prinsip *credibility* dan *trustworthiness* dalam penelitian kualitatif. Strategi triangulation diterapkan dengan membandingkan berbagai jenis data, termasuk teks kebijakan, materi kampanye, dan dokumen edukatif, untuk memastikan konsistensi temuan (Denzin, 2017). Selain itu, analisis dilakukan secara iteratif dengan mengaitkan temuan empiris dan kerangka teoritis guna menghindari interpretasi yang terlepas dari konteks konseptual. Pendekatan *thick description* digunakan untuk menyajikan analisis wacana secara mendalam dan kontekstual, sehingga pembaca dapat memahami latar sosial, institusional, dan ideologis yang membentuk strategi komunikasi pembangunan (Lincoln & Guba, 1985). Transparansi prosedur analisis dan justifikasi metodologis diperkuat melalui pemaparan tahapan analisis yang sistematis, mulai dari seleksi data, pengkodean wacana, hingga interpretasi tematik. Dengan pendekatan ini, penelitian tidak hanya menghasilkan deskripsi tekstual, tetapi juga penjelasan kritis mengenai bagaimana strategi komunikasi pembangunan beroperasi sebagai mekanisme yang menghubungkan produksi makna, partisipasi publik, dan dukungan kebijakan secara berkelanjutan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Fragmentasi Instrumen dalam Strategi Komunikasi Pembangunan

Hasil analisis menunjukkan bahwa strategi komunikasi pembangunan dijalankan melalui instrumen edukasi, kampanye, dan policy brief yang beroperasi secara terpisah dan tidak terkoordinasi secara sistematis. Materi edukasi publik cenderung disusun dalam format informatif dan normatif, dengan penekanan pada penyampaian prosedur, tujuan program, serta peran masyarakat sebagai penerima pesan. Dokumentasi menunjukkan bahwa pesan edukatif jarang dirancang untuk beresonansi dengan narasi kampanye yang beredar di ruang publik digital. Kampanye publik memperlihatkan karakter visual yang kuat dan penggunaan narasi persuasif yang intens, namun substansi pesan sering kali disederhanakan untuk tujuan keterjangkauan audiens. Policy brief disusun dalam bahasa administratif yang teknis dan padat,

dengan fokus pada ringkasan masalah dan rekomendasi kebijakan formal. Pola ini menunjukkan adanya pemisahan fungsi komunikasi yang tajam antar instrumen, sehingga pesan pembangunan tidak membentuk alur komunikasi yang berkesinambungan. Temuan ini konsisten dengan evaluasi empiris internasional yang mengidentifikasi kecenderungan sektoral dalam praktik komunikasi pembangunan, di mana setiap instrumen bekerja dalam logika institusionalnya masing-masing tanpa mekanisme integrasi yang jelas (Manyozo, 2017; Waisbord, 2018).

Analisis lanjutan memperlihatkan bahwa fragmentasi tersebut juga tercermin dalam perbedaan segmentasi audiens dan tujuan komunikasi. Edukasi publik secara dominan menargetkan masyarakat lokal melalui pendekatan komunitas, sementara kampanye publik diarahkan pada audiens luas dengan orientasi visibilitas dan jangkauan. Policy brief secara eksklusif ditujukan kepada pengambil kebijakan dan aktor institusional. Ketidaksinambungan ini menyebabkan pesan yang diterima oleh masing-masing audiens tidak membentuk pemahaman kolektif yang terpadu mengenai isu pembangunan yang sama. Data menunjukkan bahwa isu yang ditekankan dalam materi edukasi sering kali tidak muncul secara eksplisit dalam kampanye publik, sementara rekomendasi kebijakan dalam policy brief tidak selalu merefleksikan respons atau kebutuhan masyarakat yang teridentifikasi melalui aktivitas edukatif. Pola ini menghasilkan variasi narasi yang signifikan antar instrumen komunikasi. Studi empiris lintas negara menunjukkan bahwa kondisi serupa berdampak pada lemahnya konsolidasi pesan pembangunan dan rendahnya efektivitas komunikasi jangka panjang (McAnany, 2020). Temuan ini menegaskan bahwa fragmentasi strategi tidak hanya bersifat struktural, tetapi juga memengaruhi kualitas representasi isu pembangunan.

Periode analisis 2020–2024 juga menunjukkan bahwa fragmentasi strategi komunikasi berdampak pada keberlanjutan pesan pembangunan. Materi kampanye cenderung mengalami siklus intensitas tinggi dalam waktu singkat, sementara materi edukasi berjalan secara sporadis dan bergantung pada kegiatan proyek tertentu. Policy brief disusun berdasarkan kebutuhan administratif dan siklus perencanaan kebijakan, sehingga tidak selalu sinkron dengan dinamika komunikasi publik. Ketidaksamaan ritme ini menghasilkan jeda komunikasi yang signifikan antara ruang publik dan ruang kebijakan. Data empiris menunjukkan bahwa pesan pembangunan jarang diperbarui secara konsisten lintas instrumen, sehingga pembelajaran publik tidak terakumulasi secara sistematis. Kondisi ini sejalan dengan temuan internasional yang menyoroti lemahnya mekanisme pembelajaran institusional dalam komunikasi pembangunan yang terfragmentasi (Freedman, 2014). Secara keseluruhan, hasil

ini memperlihatkan bahwa fragmentasi instrumen komunikasi pembangunan membatasi kemampuan strategi komunikasi untuk membangun pemahaman publik yang konsisten dan berkelanjutan.

Kesenjangan antara Visibilitas Publik dan Dukungan Kebijakan

Hasil penelitian menunjukkan adanya kesenjangan yang jelas antara tingkat visibilitas isu pembangunan di ruang publik dan tingkat dukungan kebijakan yang dihasilkan. Kampanye publik terbukti efektif meningkatkan eksposur isu melalui media digital, dengan indikator berupa peningkatan frekuensi pesan, jangkauan audiens, dan interaksi simbolik. Namun, peningkatan visibilitas tersebut tidak secara otomatis diikuti oleh respons kebijakan yang signifikan. Data menunjukkan bahwa isu dengan intensitas kampanye tinggi sering kali tidak tercermin dalam prioritas kebijakan atau alokasi sumber daya. Aktivitas edukasi berbasis komunitas menghasilkan pemahaman dan keterlibatan yang lebih mendalam, tetapi kontribusinya terhadap proses kebijakan tidak terdokumentasi secara sistematis. Policy brief jarang mengaitkan rekomendasi kebijakan dengan dinamika visibilitas publik atau hasil kampanye. Temuan ini sejalan dengan laporan empiris internasional yang menunjukkan bahwa perhatian publik bersifat fluktuatif dan tidak selalu diterjemahkan ke dalam tindakan institusional tanpa mekanisme advokasi yang terstruktur (Freedman, 2014; McAnany, 2020).

Analisis data juga memperlihatkan bahwa partisipasi publik yang dihasilkan melalui kampanye bersifat temporer dan berorientasi pada respons jangka pendek. Interaksi digital seperti berbagi konten atau komentar meningkat selama periode kampanye aktif, namun menurun secara signifikan setelah intensitas kampanye berakhir. Aktivitas edukasi menghasilkan partisipasi yang lebih stabil, tetapi tidak memiliki daya jangkau yang luas. Policy brief tidak secara konsisten memasukkan data partisipasi publik sebagai dasar rekomendasi kebijakan. Pola ini menunjukkan bahwa partisipasi publik tidak terintegrasi secara utuh dalam siklus komunikasi pembangunan. Studi empiris global menunjukkan bahwa kondisi serupa menyebabkan kesenjangan antara legitimasi sosial dan legitimasi kebijakan, di mana dukungan publik tidak terartikulasikan secara formal dalam proses pengambilan keputusan (Denzin, 2017). Temuan ini memperlihatkan bahwa visibilitas dan partisipasi publik merupakan dimensi yang berdiri sendiri dalam praktik komunikasi pembangunan.

Hasil analisis juga menunjukkan bahwa isu pembangunan dengan pendekatan edukatif yang konsisten cenderung memiliki dampak jangka panjang yang lebih stabil

dibandingkan isu yang bergantung pada kampanye intensif. Isu yang disampaikan melalui edukasi berulang menunjukkan tingkat pemahaman masyarakat yang lebih baik, meskipun tidak selalu memperoleh perhatian luas di media. Sebaliknya, isu dengan eksposur kampanye tinggi mengalami siklus perhatian yang cepat dan tidak berkelanjutan. Policy brief yang dianalisis jarang membedakan kedua pola tersebut dalam perumusan rekomendasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa mekanisme konversi visibilitas publik menjadi dukungan kebijakan belum terbangun secara sistematis. Temuan ini konsisten dengan evaluasi internasional yang menekankan bahwa tanpa integrasi antara komunikasi publik dan advokasi kebijakan, dampak komunikasi pembangunan cenderung bersifat sementara (Waisbord, 2018). Secara keseluruhan, hasil penelitian menegaskan bahwa visibilitas publik dan perubahan kebijakan merupakan dua hasil yang tidak otomatis saling berkaitan dalam praktik komunikasi pembangunan.

DISKUSI

Temuan mengenai fragmentasi antara edukasi, kampanye, dan policy brief memperkuat kritik global terhadap praktik komunikasi pembangunan yang masih beroperasi dalam logika sektoral dan instrumental. Literatur internasional menunjukkan bahwa komunikasi pembangunan kerap diposisikan sebagai aktivitas pendukung proyek, bukan sebagai proses strategis yang terintegrasi dengan tata kelola kebijakan (Servaes, 2021; Waisbord, 2018). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masing-masing instrumen komunikasi bekerja dalam kerangka institusional yang berbeda, sehingga gagal membentuk alur komunikasi yang koheren dari tingkat masyarakat hingga kebijakan. Kondisi tersebut mencerminkan apa yang dalam kajian global disebut sebagai disartikulasi komunikasi, yaitu terputusnya relasi antara produksi pengetahuan sosial dan mekanisme pengambilan keputusan formal (McAnany, 2020). Diskusi ini menegaskan bahwa persoalan utama bukan terletak pada ketiadaan aktivitas komunikasi, melainkan pada absennya desain strategis yang mampu menyinergikan berbagai instrumen komunikasi ke dalam satu kerangka tujuan pembangunan. Dengan demikian, fragmentasi yang teridentifikasi dalam hasil penelitian tidak dapat dipahami semata-mata sebagai kelemahan implementasi, tetapi sebagai konsekuensi dari paradigma komunikasi pembangunan yang belum sepenuhnya bergeser dari pendekatan administratif menuju pendekatan relasional dan partisipatif.

Kesenjangan antara visibilitas publik dan dukungan kebijakan yang ditemukan dalam penelitian ini juga sejalan dengan temuan empiris di berbagai konteks internasional, khususnya di negara-negara Global South. Studi global menunjukkan bahwa tingginya perhatian publik yang dihasilkan melalui kampanye media tidak secara otomatis menghasilkan perubahan kebijakan apabila tidak didukung oleh mekanisme advokasi berbasis bukti yang sistematis (Freedman, 2014). Diskusi ini menyoroiti bahwa kampanye cenderung menghasilkan legitimasi simbolik, sementara policy brief beroperasi dalam logika teknokratis yang sering kali terlepas dari dinamika sosial. Literatur komunikasi pembangunan menekankan bahwa jurang antara partisipasi sosial dan kebijakan publik merupakan tantangan struktural yang berulang, terutama ketika pengetahuan komunitas tidak diterjemahkan ke dalam bahasa kebijakan yang dapat diterima institusi (Manyozo, 2017). Dalam konteks ini, hasil penelitian memperlihatkan bahwa edukasi memiliki potensi membangun kapasitas dan pemahaman jangka panjang, tetapi kontribusinya tereduksi ketika tidak terhubung dengan proses framing kampanye dan advokasi kebijakan. Diskusi ini menegaskan bahwa integrasi antar instrumen komunikasi merupakan prasyarat penting untuk mengonversi visibilitas publik menjadi dukungan kebijakan yang berkelanjutan.

Berdasarkan dialog antara temuan empiris dan literatur internasional, penelitian ini menempatkan integrasi edukasi, kampanye, dan policy brief sebagai inti dari strategi komunikasi pembangunan yang transformatif. Integrasi tersebut tidak dapat dipahami sebagai penyelarasan teknis semata, melainkan sebagai proses relasional yang menghubungkan produksi makna di tingkat masyarakat dengan legitimasi kebijakan di tingkat institusional. Literatur global menekankan bahwa komunikasi yang mampu memediasi relasi ini berpotensi memperkuat tata kelola pembangunan yang inklusif dan responsif (Servaes, 2021; Waisbord, 2018). Diskusi ini berargumen bahwa tanpa integrasi, komunikasi pembangunan akan terus menghasilkan dampak parsial yang bersifat temporer. Kontribusi utama penelitian ini terletak pada penguatan argumen bahwa strategi komunikasi pembangunan harus diposisikan sebagai mekanisme tata kelola yang menjembatani edukasi partisipatif, pembentukan opini publik, dan advokasi kebijakan berbasis bukti. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memperkaya diskursus teoretis komunikasi pembangunan, tetapi juga menawarkan refleksi kritis bagi praktik pembangunan di negara-negara berkembang yang tengah berupaya memperkuat hubungan antara masyarakat, media, dan kebijakan publik.

KESIMPULAN

Penelitian ini menjawab pertanyaan riset dengan menunjukkan bahwa strategi komunikasi pembangunan yang mengandalkan edukasi, kampanye, dan policy brief secara terpisah cenderung menghasilkan dampak yang terfragmentasi dan tidak berkelanjutan. Temuan utama menegaskan bahwa ketiadaan integrasi antarinstrumen komunikasi menyebabkan kesenjangan antara peningkatan kesadaran publik, partisipasi masyarakat, dan dukungan kebijakan formal. Kontribusi teoretis penelitian ini terletak pada penguatan argumen bahwa komunikasi pembangunan perlu diposisikan sebagai mekanisme tata kelola yang bersifat relasional, bukan sekadar alat penyebaran pesan, dengan menempatkan integrasi edukasi, kampanye, dan policy brief sebagai inti dari strategi komunikasi pembangunan yang transformatif. Pendekatan ini memperluas kajian komunikasi pembangunan dengan menjembatani level komunitas, ruang publik, dan institusi kebijakan dalam satu kerangka konseptual yang koheren. Dari sisi implikasi kebijakan, hasil penelitian menekankan pentingnya perancangan policy brief yang tidak hanya berbasis data teknokratis, tetapi juga merefleksikan dinamika partisipasi publik yang dihasilkan melalui edukasi dan kampanye. Implikasi etika media juga muncul dalam kebutuhan untuk mengelola kampanye pembangunan secara bertanggung jawab agar visibilitas isu tidak bersifat manipulatif atau temporer, melainkan berorientasi pada pembentukan pemahaman publik yang berkelanjutan. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menguji model integrasi komunikasi pembangunan ini melalui studi empiris berbasis kasus atau pendekatan komparatif lintas negara, guna memperdalam pemahaman mengenai bagaimana integrasi strategi komunikasi dapat beroperasi dalam konteks institusional dan budaya yang berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

- Couldry, N. (2012). *Media, society, world: Social theory and digital media practice*. Polity Press.
- Denzin, N. K. (2017). *The research act: A theoretical introduction to sociological methods*. Routledge.
- Entman, R. M. (1993). Framing: Toward clarification of a fractured paradigm. *Journal of Communication*, 43(4), 51–58. <https://doi.org/10.1111/j.1460-2466.1993.tb01304.x>
- Fairclough, N. (2015). *Language and power* (3rd ed.). Routledge.
- Floridi, L. (2013). *The ethics of information*. Oxford University Press.
- Freedman, D. (2014). *The politics of media policy*. Polity Press.
- Freire, P. (1970). *Pedagogy of the oppressed*. Continuum.

- Hadi, A. (2020). Development communication and participation in Indonesia. *Journal of Development Communication*, 31(2), 45–58. <https://doi.org/10.1080/01296612.2020.1739098>
- Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). *Naturalistic inquiry*. SAGE Publications.
- Manyozo, L. (2017). *Media, communication and development: Three approaches*. SAGE Publications.
- McAnany, E. G. (2020). Communication for development: Looking backward, looking forward. *Information Technology for Development*, 26(1), 1–20. <https://doi.org/10.1080/02681102.2019.1668340>
- Ramadhani, R. W., & Prihantoro, E. (2020). Strategi komunikasi pembangunan pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam menerapkan Nawacita dan tujuan pembangunan berkelanjutan. *Jurnal Komunikasi Pembangunan*, 18(2), 117–129. <https://doi.org/10.46937/18202028913>
- Rogers, E. M. (2003). *Diffusion of innovations* (5th ed.). Free Press.
- Rogers, E. M. (2004). A prospective and retrospective look at the diffusion model. *Journal of Health Communication*, 9(S1), 13–19. <https://doi.org/10.1080/10810730490271449>
- Rullah, A. D., Silva, F. R., Pratama, E. T. H., & Purwanto, E. (2025). Strategi komunikasi untuk meningkatkan literasi digital di kalangan pemuda. *Jurnal Pemberdayaan Ekonomi dan Masyarakat*, 2(1), 16. <https://doi.org/10.47134/jpem.v2i1.568>
- Servaes, J. (2021). *Communication for development and social change*. SAGE Publications.
- Tufte, T. (2017). *Communication and social change*. Polity Press.
- Waisbord, S. (2018). *Communication: A post-discipline*. Polity Press.
- Weimer, D. L., & Vining, A. R. (2017). *Policy analysis: Concepts and practice* (6th ed.). Routledge.
- Yunandar, F., Aji, J. F., Wibisono, W., & Purwanto, E. (2025). Strategi komunikasi publik dalam kampanye pengelolaan sampah. *Interaction Communication Studies Journal*, 1(4), 20. <https://doi.org/10.47134/interaction.v1i4.3607>